

RENCANA KERJA **(RENJA)** **TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

Jln. Raya Parigi No. Tlp/fax (0265)
2641089 kode Pos 46393





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Raya Parigi No. __ Tlp/Fax (0265) 2641089 Kode Pos
46393

e-mail : setwanpangandaran@gmail.com

website : dprd.pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 188.4/189/SETWAN/2024

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
 - b. bahwa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40), Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

- Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,



HERI GUSTARI

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 188.4/189/SETWAN/2024
TANGGAL : 19 Juli 2024

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
 - 1. Sekretariat DPRD
- B. Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,



HERI GUSTARI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam penentuan program dan kegiatan pada tahun 2025. Didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021–2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Parigi, 19 Juli 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN


Drs. HERI GUSTARI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680817 199301 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN LALU12

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN LALU12

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH35

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH37

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD37

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD60

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....60

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD61

3.3 PROGRAN DAN KEGIATAN61

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH80

BAB V PENUTUP.....101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.



3. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Maka dari itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang



- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);



19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan



- Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah



- Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten



- Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);



48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan;
2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan; dan
3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas-tugas kepada Bupati.
4. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah :

1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat DPRD;
2. Memberikan Kontribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan;
3. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025; dan
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen



Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap



capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perubahan Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Sekretariat DPRD tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran 2021 - 2026 adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan dewan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 secara detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut :



Tabel 2.1.1
Realisasi Indikator Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LHE AKIP Sekretariat DPRD	69,25	70,00	101,8%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	2,66-2,75	4,07	153,01%

Tabel 2.1.2
Target Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LHE AKIP Sekretariat DPRD	69,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.243.829.958	30.473.772.898
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	2,66-2,75	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	10.922.827.450	9.670.289.730



Tabel 2.1.1
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
SEKRETARIAT DPRD		40.144.062.628	34.945.147.651	87,05
PROGRAM PENUNJANG URUSAN KABUPATEN/ KOTA		30.442.622.898	28.230.076.187	92,73
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.000.000	27.200.000	64,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.121.300	1.121.500	100,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.121.300	0	0
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.935.000	1.935.000	100,00
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.100	0	0
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	212.980	191.640	89,98
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.440.306.363	2.948.067.772	85,69
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.345.500	28.539.000	65,84
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.821.500	1.795.500	98,57
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	308.300	291.640	91,60
11.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.883.000	14.850.400	99,78
12.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.000.000	27.200.000	64,76
13.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.400.000	1.400.000	8,05
14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	587.900.000	426.919.478	72,62
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.800.115	52.492.000	79,77
16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.401.332	91.394.014	73,47
17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.789.730	52.354.000	87,56
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.000.000	134.600.000	83,60
19.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.827.718	122.985.000	90,54
20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.126.000	63.016.250	91,16



21.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	580.240.000	565.541.000	97,47
22.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.564.000	180.114.500	69,93
23.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.200.000	33.600.000	64,37
24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.850.000	122.350.000	52,72
25.	Pengadaan Aset Tak Berwuiud	79.254.000	79.254.000	100,00
26.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	0	0
27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000	5.182.500	47,99
28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	670.800.000	655.638.275	97,74
29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.569.979.927	1.913.439.177	74,45
30.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.000.000	272.894.141	86,91
31.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.720.000	195.616.674	68,46
32.	Pemeliharaan Mebel	11.250.000	5.400.000	48,00
33.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.250.000	34.310.000	57,91
34.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	57.600.000	55.996.000	97,22
35.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.722.000	139.807.000	73,30
36.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.229.111	64.840.000	82,88
37.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.688.110.022	19.624.259.726	99,68
38.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.000.000	0	0
39.	Fasilitasi Fraksi DPRD	4.500.000	0	0
40.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	373.753.200	285.480.000	76,38
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		9.701.439.730	6.715.071.464	69,22
41.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	98.131.750	68.410.000	69,71
42.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	560.075.500	388.155.500	69,30
43.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	3.236.480	0	0



44.	Fasilitasi Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Penyusunan	589.520.160	477.340.000	80,97
45.	Pembahasan KUA dan PPAS		141.101.050	132.921.000	94,20
46.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		181.314.000	125.213.000	69,06
47.	Pembahasan APBD		176.775.850	102.485.000	57,97
48.	Pembahasan APBD Perubahan		181.564.000	72.285.000	39,81
49.	Pembahasan Laporan Semester		2.400.000	0	0
50.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		130.913.700	128.668.000	98,28
51.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		37.560.000	19.566.000	52,09
52.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		40.965.000	23.270.000	56,80
53.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		35.740.000	17.235.000	48,22
54.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		33.465.000	14.966.000	44,72
55.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		7.010.000	7.000.000	99,86
56.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		107.946.850	104.746.500	97,04
57.	Pendalaman Tugas DPRD		2.191.691.000	1.343.300.022	61,29
58.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		15.400.000	15.400.000	100,00
59.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		255.000.000	210.000.000	82,35
60.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		331.175.080	141.150.000	42,62
61.	Penyusunan Program Kerja DPRD		8.139.840	2.810.000	34,52
62.	Kunjungan Kerja dalam Daerah		33.744.000	3.744.000	11,10
63.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		1.350.000	1.050.000	77,78
64.	Pelaksanaan Reses		2.481.630.280	2.002.951.840	80,71
65.	Pengawasan Kode Etik DPRD		59.233.350	50.035.000	84,47
66.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		639.000.000	603.000.000	94,37
67.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		806.309.500	267.790.000	33,21
68.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		13.950.040	0	0
69.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		133.139.900	115.534.800	86,78
70.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		403.957.400	276.044.802	68,34



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan Fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top- down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat ditabel sebagai berikut:



Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Nilai SAKIP Sekretraiat DPRD	-		%	68.25	69.25	72.50	76,50	61.60	70.00	72.50	76,50	-
2.	Indeks Pelayanan Publik	-		%	2.61-2.65	2.66-2.75	2.86-2.95	2,96-3,05	3,26	4.07	2.95	3.05	-



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang di kehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan;
4. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga; dan
5. Menjelang masa Pemilihan Umum banyak kebijakan yang perlu dikaji dan ditingkatkan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan mengenai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara total perencanaan tidak terjadi nilai yang signifikan bahkan masih sama.

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lo- kas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lo- kas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	SEKRETARIAT DPRD										
					44.175.681.000,00					44.175.681.000,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KAB. PANGANDARAN	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90 %	29.984.234.168,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KAB. PANGANDARAN	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90 %	29.984.234.168,00	



1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	3.818.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	3.818.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	270.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	270.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	



	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	330.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.050.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.050.000,00	



	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.178.400,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.178.400,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	57 Dokumen	3.611.104.850,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	57 Dokumen	3.611.104.850,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	3.611.104.850,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	3.611.104.850,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	0,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	0,00	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	0,00	



	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	43 Dokumen	14.203.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	43 Dokumen	14.203.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14.203.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14.203.000,00	



	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Dokumen	0,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Dokumen	0,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	



1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	268 Dokumen	458.803.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	268 Dokumen	458.803.600,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0,00	



	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	20.575.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	20.575.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	438.228.600,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	438.228.600,00	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	780 Orang	1.403.063.546,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	780 Orang	1.403.063.546,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	98.031.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	98.031.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.238.160,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.238.160,00	



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	0,00	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	0,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	486.345.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	486.345.000,00	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	680.449.386,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	680.449.386,00	



	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0,00	
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit prasarana yang baik dan layak fungsi	29 Unit	80.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit prasarana yang baik dan layak fungsi	29 Unit	80.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	0,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	0,00	



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	80.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	80,000,000	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1270 Laporan	3.063.614.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1270 Laporan	3.063.614.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1150 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1150 Laporan	15.000.000,00	



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	671.214.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	671.214.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108 Laporan	2.377.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108 Laporan	2.377.400.000,00	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	165 Unit	859.871.728,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	165 Unit	859.871.728,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	279.020.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	279.020.000,00	



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	231.220.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	231.220.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	0,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	66.250.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	66.250.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	27 unit	0,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	27 unit	0,00	



	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 unit	161.981.728,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 unit	161.981.728,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 unit	121.400.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 unit	121.400.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Kab. Pangandaran	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/R ehabilitasi	1 Ha	0,00	Pemeliharaan/Re habilitasi Tanah	Kab. Pangandaran	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Re habilitasi	1 Ha	0,00	
1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	120 Orang	19.834.755.044,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	120 Orang	19.834.755.044,00	



	Penyelenggara n Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bu lan	19.340.158.964,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/ Bulan	19.340.158.964,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	414.596.080,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	414.596.080,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80.000.000,00	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80.000.000,00	
1.16	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	84 Laporan	655.000.000,00	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	84 Laporan	655.000.000,00	



	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	72 Laporan	50.200.000,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	72 Laporan	50.200.000,00	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	604.800.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	604.800.000,00	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Pangandaran	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik	70 %	14.191.446.832,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Pangandaran	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik	70 %	14.191.446.832,00	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	24 Dokumen	1.998.741.358,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	24 Dokumen	1.998.741.358,00	



	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 Dokumen	179.559.464,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 Dokumen	179.559.464,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	1.014.593.000,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	1.014.593.000,00	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	18.694.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	18.694.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	785.894.894,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	785.894.894,00	



	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0,00	
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	7 Dokumen	1.232.806.360,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	7 Dokumen	1.232.806.360,00	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	245.781.272,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	245.781.272,00	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	245.781.272,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	245.781.272,00	



	Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	245.781.272,00	Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	245.781.272,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	245.781.272,00	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	245.781.272,00	
	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	3.900.000,00	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	3.900.000,00	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	245.781.272,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	245.781.272,00	



2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	308 Laporan	612.794.734,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	308 Laporan	612.794.734,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	39.186.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	39.186.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	39.186.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	39.186.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	72 Laporan	39.186.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	72 Laporan	39.186.000,00	



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	72 Laporan	39.186.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	72 Laporan	39.186.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	28 Laporan	0,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	28 Laporan	0,00	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	236.481.272,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	236.481.272,00	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.600.000,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.600.000,00	



	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	215.969.462,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	215.969.462,00	
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	45 Dokumen	2.860.642.750,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	45 Dokumen	2.860.642.750,00	
	Orientasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0,00	Orientasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0,00	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	2.216.597.850,00	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	2.216.597.850,00	



	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	34.800.000,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	34.800.000,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	60.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	60.000.000,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	360.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	360.000.000,00	
	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraa nHubungan Masyarakat	28 Dokumen	179.999.900,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	28 Dokumen	179.999.900,00	



	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	9.245.000,00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	9.245.000,00	
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	28 Laporan	1.419.696.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	28 Laporan	1.419.696.000,00	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	64.924.000,00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	64.924.000,00	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.000.000,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.000.000,00	



	Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	Jumah dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.343.772.000,00	Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	Jumah dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.343.772.000,00	
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	1 Laporan	112.050.388,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	1 Laporan	112.050.388,00	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Laporan	0,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Laporan	0,00	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	112.050.388,60	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	112.050.388,60	



2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	33 Dokumen	639.000.000,00	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	33 Dokumen	639.000.000,00	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	33 Dokumen	639.000.000,00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	33 Dokumen	639.000.000,00	
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	57 Dokumen	5.315.715.242,00	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	57 Dokumen	5.315.715.242,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16 Dokumen	3.034.482.142,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16 Dokumen	3.034.482.142,00	



	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	8.374.100,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	8.374.100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	246.925.500,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	246.925.500,00	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.620.847.500,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.620.847.500,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	16 Dokumen	405.086.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	16 Dokumen	405.086.000,00	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada table T-C.32 berikut ini:

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat
N I H I L					



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari segi sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk, keragaman budaya dan sumber daya manusia. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2025-2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang memiliki Visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”, yang diimplementasikan melalui 6 prioritas misi, yakni:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unsur fasilitasi atau pelayanan kepada DPRD. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel”. Maka dari itu Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola



Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Meningkatkan kualitas pelayanan public yang cepat dan responsive”. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan/fasilitasi terhadap kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dalam mengakomodir kepentingan masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Mengacu kepada Visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap Misi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu, “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2025 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran yang ingin diwujudkan pada 2021-2026 yaitu mewujudkan “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2025 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 program, 18 kegiatan dan 89 Sub kegiatan, sebagai berikut :



Tabel 3.3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PANGANDARAN

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catat an Penti ng	Perkiraan Maju Rencana tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02				SEKRETARIAT DPRD				44.175.681.000,00					46.563.745.842,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kab. Pangan- daran	95 %	29.984.234.168,00	PAD		95 %	30.781.077.770,00	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangan- daran	9 Dokumen	3.818.400,00	PAD		9 Dokumen	75.443.900,00	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangan- daran	3 Dokumen	270.000,00	PAD		3 Dokumen	58.586.006,00	



4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	330.000,00	PAD		1 Dokumen	1.040.640,00
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	330.000,00	PAD		1 Dokumen	1.040.640,00
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	330.000,00	PAD		1 Dokumen	4.578.658,00
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	330.000,00	PAD		1 Dokumen	4.578.658,00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	1.050.000,00	PAD		1 Laporan	4.578.658,00



4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	1 Laporan	1.178.400,00	PAD		1 Laporan	1.040.640,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	Kab. Pangandaran	57 Dokumen	3.611.104.850,00	PAD		57 Dokumen	4.398.155.475,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	25 Orang/Bulan	3.611.104.850,00	PAD		25 Orang/Bulan	4.398.155.475,00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	14 Dokumen	0,00	PAD		14 Dokumen	0,00
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	0,00	PAD		1 Laporan	0,00
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	0,00	PAD		1 Dokumen	0,00
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Pangandaran	14 Dokumen	0,00	PAD		14 Dokumen	0,00



						Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD							
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangan- daran	2 Dokumen	0,00	PAD		2 Dokumen	0,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangan- daran	43 Dokumen	14.203.000,00	PAD		43 Dokumen	15.858805,00
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangan- daran	2 Dokumen	0,00	PAD		2 Dokumen	0,00
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangan- daran	2 Dokumen	14.203.000,00	PAD		2 Dokumen	15.858805,00
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangan- daran	2 Laporan	0,00	PAD		2 Laporan	0,00
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangan- daran	1 Laporan	0,00	PAD		1 Laporan	0,00
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Pangan- daran	24 Dokumen	0,00	PAD		24 Dokumen	0,00



					Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD							
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	12 Laporan	0,00	PAD		12 Laporan	0,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Pangandaran	23 Dokumen	458.803.600,00	PAD		23 Dokumen	322.587.244,00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pangandaran	1 Paket	0,00	PAD		1 Paket	0,00
4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	0,00	PAD		12 Dokumen	0,00
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran	25 Orang	0,00	PAD		25 Orang	0,00
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	50 Orang	20.575.000,00	PAD		50 Orang	62.436.241,00
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Pangandaran	180 Orang	438.228.600,00	PAD		180 Orang	260.151.003,00



					Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan							
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Pangandaran	780 Dokumen	1.403.063.546,00	PAD		780 Dokumen	2.273.319.782,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1 Paket	0,00	PAD		1 Paket	0,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	3 Paket	98.031.000,00	PAD		3 Paket	320.282.331,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran	2 Paket	0,00	PAD		2 Paket	0,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	4 Paket	0,00	PAD		4 Paket	0,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1 Paket	138.238.160,00	PAD		1 Paket	156.090.602,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	13 Dokumen	0,00	PAD		13 Dokumen	0,00



4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Pangan- daran	1 Paket	0,00			1 Paket	0,00
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Pangan- daran	240 Laporan	486.345.000,00	PAD		240 Laporan	198.261.079,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pangan- daran	500 Laporan	680.449.386,00	PAD		500 Laporan	1.598.685.770,00
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangan- daran	12 Dokumen	0,00	PAD		12 Dokumen	0,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangan- daran	29 Unit	80.000.000,00	PAD		29 Unit	83.248.321,00
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangan- daran	1 Unit	0,00	PAD		1 Unit	0,00
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pangan- daran	2 Unit	0,00	PAD		2 Unit	0,00
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pangan- daran	26 Unit	0,00	PAD		26 Unit	0,00



4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangan-daran	1 Unit	80.000.000,00	PAD		1 Unit	83.248.321,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangan-daran	1270 Laporan	3.063.614.000,00	PAD		1270 Laporan	3.250.152.280,00
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangan-daran	1150 Laporan	15.000.000,00	PAD		1150 Laporan	15,609.060,00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangan-daran	12 Laporan	671.214.000,00	PAD		12 Laporan	468.271.805.00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangan-daran	108 Laporan	2.377.400.000,00	PAD		108 Laporan	2.766.271.415,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangan-daran	139 Unit	859.871.728,00	PAD		139 Unit	816.697.246,00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kab. Pangan-daran	7 Unit	279.020.000,00	PAD		7 Unit	257.143.657,00



					Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangan- daran	20 Unit	231.220.000,00	PAD		20 Unit	313.450.740,00
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangan- daran	15 Unit	0,00	PAD		15 Unit	0,00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pangan- daran	64 Unit	66.250.000,00	PAD		64 Unit	131.636.407,00
4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangan- daran	27 Unit	0,00	PAD		27 Unit	0,00
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Pangan- daran	3 Unit	161.981.728,00	PAD		3 Unit	62.436.241,00
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilit asi	Kab. Pangan- daran	3 Unit	121.400.000,00	PAD		3 Unit	52.030.201,00



4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Pangandaran	1 Ha	0,00	PAD		1 Ha	0,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran	120 orang	19.834.755.044,00	PAD		120 orang	18.338.654.547,00
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Pangandaran	40 Orang/Bulan	19.340.158.964,00	PAD		40 Orang/Bulan	17.937.475.686,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	Kab. Pangandaran	1 Paket	414.596.080,00	PAD		1 Paket	317.930.540,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	40 Orang	80.000.000,00	PAD		40 Orang	83.248.321,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Pangandaran	84 Laporan	655.000.000,00	PAD		84 Laporan	1,206.960.170,00
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Pangandaran	72 Laporan	50.200.000,00	PAD		72 Laporan	237.882.077,00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	Kab. Pangandaran	12 Laporan	604.800.000,00	PAD		12 Laporan	969.078.093,00



4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik	Kab. Pangandaran	66 %	14.191.446.832,00	PAD		70 %	15.782.668.072,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Kab. Pangandaran	15 Dokumen	1.998.741.358,00	PAD		15 Dokumen	4.020.116.639,00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	9 Dokumen	179.559.464,00	PAD		9 Dokumen	104.060.401,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	9 Dokumen	1.014.593.000,00	PAD		9 Dokumen	2.948.294.508,00
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	18.694.000,00	PAD		2 Dokumen	52.030.201,00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Pangandaran	4 Dokumen	785.894.894,00	PAD		4 Dokumen	915.731.529,00
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	0,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan	Kab. Pangandaran	7 Dokumen	1.232.806.360,00	PAD		7 Dokumen	1.357.988.235,00



						Kebijakan anggaran yang tersusun							
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	245.781.272,00	PAD		1 Dokumen	270.557.043,00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	245.781.272,00	PAD		1 Dokumen	270.557.043,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	245.781.272,00	PAD		1 Dokumen	270.557.043,00
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	245.781.272,00	PAD		1 Dokumen	270.557.043,00
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	3.900.000,00	PAD		2 Dokumen	5.203.020,00.
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	245.781.272,00	PAD		1 Dokumen	270.557.043,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Kab. Pangandaran	308 Laporan	612.794.734,00	PAD		308 Laporan	674.342.198,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	72 Laporan	39.186.000,00	PAD		72 Laporan	94.726.807,00



					Pemerintahan dan Hukum								
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	60 Laporan	39.186.000,00	PAD		60 Laporan	105.981.356,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	72 Laporan	39.186.000,00	PAD		72 Laporan	94.726.807,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	72 Laporan	39.186.000,00	PAD		72 Laporan	94.726.807,00
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	28 Laporan	0,00	PAD		28 Laporan	0,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	1 Laporan	236.481.272,00	PAD		1 Laporan	94.726.807,00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	3.600.000,00	PAD		2 Dokumen	94.726.807,00
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	215.969.462,00	PAD		1 Dokumen	94.726.807,00



					Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Pangan- daran	45 Dokumen	2.860.642.750,00	PAD		45 Dokumen	816.170.700,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangan- daran	4 Dokumen	2.216.597.850,00	PAD		4 Dokumen	0,00
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangan- daran	12 Dokumen	34.800.000,00	PAD		12 Dokumen	54.111.409,00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangan- daran	12 Orang	60.000.000,00	PAD		12 Orang	124.872.481,00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangan- daran	6 Orang	360.000.000,00	PAD		6 Orang	374.617.444,00
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanHub ungan Masyarakat	Kab. Pangan- daran	28 Dokumen	179.999.900,00	PAD		28 Dokumen	253.203.930,00
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Pangan- daran	1 Dokumen	9.245.000,00	PAD		1 Dokumen	9.365.436,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Kab. Pangan- daran	28 Laporan	1.419.696.000,00	PAD		28 Laporan	3.156.847.086,00
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Pangan- daran	24 Laporan	64.924.000,00	PAD		24 Laporan	303.696.118,00



4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	11.000.000,00	PAD		1 Dokumen	36.421.140,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	3 Dokumen	1.343.772.000,00	PAD		3 Dokumen	2.816.729.828,00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	Kab. Pangandaran	1 Laporan	112.050.388,00	PAD		1 Laporan	6,709,125.65
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	112.050.388,00	PAD		1 Laporan	6,709,125.65
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan HasilPengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	33 Dokumen	639.000.000,00	PAD		33 Dokumen	812.722.138,00
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	Kab. Pangandaran	33 Dokumen	639.000.000,00	PAD		33 Dokumen	812.722.138,00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kab. Pangandaran	41 Dokumen	5.315.715.242,00	PAD		41 Dokumen	4,937.771.950,00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	Kab. Pangandaran	16 Dokumen	3.034.482.142,00	PAD		16 Dokumen	3.830.206.976,00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	8.374.100,00	PAD		1 Laporan	26.015.100,00



4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	246.925.500,00	PAD		12 Dokumen	225.104.708,00
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	1.620.847.500,00	PAD		12 Dokumen	149.143.529,00
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	16 Dokumen	405.086.000,00	PAD		16 Dokumen	707.301.637,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 10 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Berikut secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2025:



Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
SEKRETARIAT DPRD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rekening	Anggaran	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja	
			Indikator	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DPRD	44.175.681.000,00						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	29.709.343.789,00	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				Nilai SAKIP 72,50	90 %
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.984.234.168,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu				9 Dokumen	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Renja 2025, Renja Perubahan Tahun 2024 dan Review Renstra	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	3 Dokumen
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	330.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	330.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen



1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	330.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	330.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.050.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen capaian kinerja Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III 2024	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Laporan
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.178.400,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.611.104.850,00	Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun					40 Dokumen
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.611.104.850,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	25 Orang/ Bulan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen administrasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	12 Dokumen
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Laporan



2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	14 Dokumen
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.203.000,00	Dokumen barang milik daerah yang tersedia dalam kondisi baik					43 Dokumen
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Dokumen
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.203.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Asuransi Mobil dan Dokumen Asuransi motor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	2 Dokumen
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan hasil penilaian barang milik daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	2 Laporan
3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan hasil pembinaan, pengawasan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Nilai SAKIP 72,50	1 Laporan



	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		dan pengendalian barang milik daerah	kinerja perangkat daerah		
3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Rekonsiliasi Aset dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	24 Dokumen
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	12 Laporan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	458.803.600,00	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersusun					23 Dokumen
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Hasil Penilaian SAKIP	Jenis Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Paket
4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen sistem informasi kepegawaian/bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	12 Dokumen
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	25 Orang
4.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.575.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	50 Orang



4.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	438.228.600,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	108 Orang
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.403.063.546,00	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik					780 Dokumen
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Paket
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.031.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket alat tulis kantor Paket penyelenggaraan acara Paket perlengkapan kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	3 Paket
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Peralatan Perabot kantor Paket Peralatan untuk kegiatan kantor lainnya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	2 Paket
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket bahan kimia Paket bahan isi tabung gas Paket bahan lainnya Paket souvenir/cinderamata	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	4 Paket
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.238.160,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket bahan cetak penggandaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Paket



5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen MOU penyediaan bahan bacaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	13 Dokumen
5.7	Penyediaan Bahan/Material	0,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen penyediaan bahan/ material	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 Paket
5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	486.345.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	240 Laporan
5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680.345.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	500 Laporan
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen penatausahaan Arsip	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	12 Dokumen
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	Unit Barang Milik daerah yang tersedia					29 Unit
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit kendaraan dinas operasional	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 unit



6.2	Pengadaan Mebel	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit mebel yang tersedia	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	2 unit
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit peralatan dan mesin yang tersedia	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	26 unit
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit sarana dan prasarana pendukung	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1 unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.063.614.000,00	Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia					1270 Laporan
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penyediaan jasa surat menyurat: Materai Paket pengiriman	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1000 Laporan 150 Laporan
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	671.214.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	12 Laporan



7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.377.400.000,00	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor: Laporan rapat DPRD/Sekretariat DPRD Laporan jasa tenaga pelayanan umum kantor Laporan jasa tenaga kebersihan Laporan jasa tenaga Keamanan Laporan jasa tenaga supir	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	108 Laporan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.871.728,00	Unit barang milik daerah yang terpelihara					139 unit
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.020.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hasil Penilaian SAKIP	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	7 unit
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.220.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hasil Penilaian SAKIP	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	20 unit
8.3	Pemeliharaan Mebel	0,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	15 unit



8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.250.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	64 unit
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	27 unit
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.981.728,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Hasil Penilaian SAKIP	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	3 unit
8.7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.400.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Hasil Penilaian SAKIP	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	3 unit
8.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0,00	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Hasil Penilaian SAKIP	Luas Tanah yang dilakukan rehabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	1Ha
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.834.755.044,00	Orang Yang Menerima Layanan Keuangan Yang Tersedia					120 orang
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.340.158.964,00	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	40 Orang/ Bulan
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	414.596.080,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Nilai SAKIP 72,50	1 Paket



						kinerja perangkat daerah		
9.3	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	80.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	40 Orang
10.	Layanan Administrasi DPRD	655.000.000,00	Laporan Layanan Administrasi Yang Tersedia					84 Laporan
10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.200.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD (6 fraksi x 12 bulan)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 72,50	72 Laporan
10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	604.800.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Rapat paripurna hari jadi, 16 agustus, 3 kali rapat pembukaan masa sidang, 3 kali rapat tutup masa sidang, 1 rapat PAW, dan 3 kali rapat paripurna reses)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	12 Laporan
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.191.446.832,00	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik				Nilai Indeks Pelayanan Publik 2.86-2.95	66 %
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.998.741.358,00	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Yang Disepakati Bersama				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen



1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	179.559.464,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	9 Dokumen
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.014.593.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	9 Dokumen
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	18.694.000,00	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	2 Dokumen
1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	785.894.894.,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi	Nilai IPP 2.86-2.95	4 Dokumen



						tugas dan fungsi DPRD		
1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0,00	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.232.806.360,00	Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Tersusun				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	245.781.272,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Nota Kesepakatan KUA dan PPAS)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	245.781.272,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Nota kesepakatan KUPA PPAS Perubahan)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen



2.3	Pembahasan APBD	245.781.272,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Raperda APBD)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	245.781.272,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Raperda APBD Perubahan)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen
2.5	Pembahasan Laporan Semester	3.900.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	2 Dokumen
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	245.781.272,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Pembahasan APBD (Raperda Pertanggungjawaban APBD)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen



						tugas dan fungsi DPRD		
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	612.794.734,00	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tersusun				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	39.186.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Rakor Komisi 1)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	72 Laporan
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	39.186.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Rakor Komisi 3)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	60 Laporan
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	39.186.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rakor komisi 4)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	72 Laporan



3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	39.186.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Rakor komisi 2)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	72 Laporan
3.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Rakor komisi 3)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	28 Laporan
3.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	236.481.272,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Laporan
3.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.600.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi	Nilai IPP 2.86-2.95	2 Laporan



						tugas dan fungsi DPRD		
3.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	215.969.462,00	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Laporan
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.860.642.750,00	Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen
4.1	Orientasi DPRD	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Orientasi DPRD (untuk anggota DPRD baru terpilih)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen
4.2	Pendalaman Tugas DPRD	2.216.597.850,00	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	4 Dokumen



4.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	34.800.000,00	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	12 Dokumen
4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60.000.000,00	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	12 Orang
4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000,00	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Tenaga Ahli Fraksi	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	6 Orang
4.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	179.999.900,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi	Nilai IPP 2.86-2.95	28 Dokumen



						tugas dan fungsi DPRD		
4.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.245.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.419.696.000,00	Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Tersusun				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	64.924.000,00	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	24 Laporan
5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.000.000,00	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Dokumen



5.3	Pelaksanaan Reses	1.343.772.000,00	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	3 Dokumen
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	112.050.388,00	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Tersusun				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen
6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	0,00	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Laporan
6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	112.050.388,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Laporan
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	639.000.000,00	Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Tersusun				Nilai IPP 2.86-2.95	24 Dokumen



7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	639.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen MOU Komunikasi dan Publikasi dengan media elektronik dan media cetak	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	33 Dokumen
8.	Fasilitasi Tugas DPRD	5.315.715.242,00	Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana				Nilai IPP 2.66 -2.75	57 Dokumen
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.034.482.142,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	16 Dokumen
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	8.374.100,00	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	1 Laporan
8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	246.925.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Hasil Rapat Badan Musyawarah dan Rapat	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	12 Dokumen



					Koordinasi Badan Musyawarah)	dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD		
8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.620.847.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Rapat Koordinasi Tugas Pimpinan DPRD)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	12 Dokumen
8.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	405.086.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Panitia Khusus (Rapat, Perjalanan Dinas, serta laporan terkait panitia khusus)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.86-2.95	16 Dokumen



BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dana anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Parigi, 19 Juli 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HERI GUSTARI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680817 199301 1 001